



KETERANGAN
Pj. Wako Padang Andree Algamar memberikan keterangan.
(kominfo)

Pj Walikota Andree Algamar Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Bencana

PADANG - SINGGALANG

Penjabat (Pj) Walikota Padang, Andree Algamar terus mengimbau warganya untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, khususnya bencana gempa bumi dan tsunami.

Terbaru, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menerbitkan Surat Edaran Walikota Padang dengan Nomor 870.539/BPBD-Pdg/IX/2024 Tentang Langkah-langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Potensi Bencana Gempat Bumi dan Tsunami.

Keluarnya Surat Edaran Walikota Padang merupakan tindak lanjut dari Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor: B-399/BNPB/D-II/BP.03.02/08/2024 perihal Langkah-langkah Ke-

siapsiagaan Zona Megathrust. Surat Edaran yang ditandatangani Pj Wako Padang, Andree Algamar tersebut menjelaskan terkait kesiapsiagaan bencana di wilayah zona megathrust yang diperkirakan berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami, maka disampaikan sejumlah hal yang harus jadi perhatian bersama masyarakat.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pantai barat Sumatera sebagai bagian wilayah zona megathrust memiliki potensi gempa bumi yang dapat melepaskan energi gempat signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam berbagai kekuatan.

"Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat, dari kapan, dimana dan berapa kekuatannya. Munculnya kembali pemantauan potensi gempa zona megathrust ini bukanlah bentuk peringatan dini (warning)

yang seolah-olah dalam waktu dekat akan segera terjadi gempa besar," kata Andree Algamar dalam surat tersebut.

Lebih lanjut dijelaskannya berdasarkan kajian para ahli terkait zona megathrust Mentawai-Siberut adalah potensi bukan prediksi, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang mengetahui.

"Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan yang terus menerus baik berupa mitigasi struktural maupun nonstruktural serta membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan aksi dini untuk selamat jika gempa bumi dan tsunami terjadi

Dalam surat tersebut juga dijelaskan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait mitigasi bencana. Pertama melakukan pemantauan peralatan peringatan dini, sistem komunikasi kebencanaan, bangunan sebagai tempat evakuasi sementara, serta jalur evakuasi yang mudah di-

akses.

Kedua memastikan rambu evakuasi terpasang di setiap ruangan dan dalam kantor. Ketiga mengencangkan pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan literasi kepada seluruh jajaran dan unsur pelaksana di setiap instansi pemerintah dan swasta.

Selanjutnya keempat, instansi pemerintah dan swasta, perkantoran, hotel, satuan pendidikan, serta tempat beraktivitas lain untuk menyusun rencana dan peta evakuasi. Kelima melakukan latihan kesiapsiagaan dan simulasi.

Keenam, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mempersiapkan rencana evakuasi keluarga dengan mempedomani brosur Padang Kota Tangguh Bencana. Terakhir, melakukan koordinasi kedaruratan melalui Padang Command Center di nomor telepon 112 (bebas pulsa) dan Pusatloops PB BPBD Kota Padang di nomor (0751) 778775. (103)

WASPADAI ANGIN BADAI DAN HUJAN DERAS

Sekitar 7 Persen Pohon Pelindung Rawan Tumbang

Padang, Singgalang

Dari sekitar 24 ribu pohon pelindung di jalan utama Kota Padang, sebanyak 7 persen dengan kondisi pohon yang rawan tumbang bila kondisi angin kencang atau badai. Oleh sebab itu diminta warga kota untuk waspada dan hati-hati ketika cuaca mulai buruk.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang, Fadelan FM kepada Singgalang baru-baru ini.

Disebutkannya, memang acap kali terjadi pohon tumbang saat angin badai dan hujan lebat. Kondisi demikian, sangat membahayakan orang dan kendaraan yang ada di se-



Fadelan FM

kitar pohon pelindung tersebut.

Fadelan meminta kepada warga untuk sebisa mungkin menghindari pohon-pohon yang rawan akan tumbang tersebut apalagi saat hujan badai.

Dia juga meminta kepada warga Kota Padang untuk tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon pelindung kare-

na rawan tertimpa pohon tumbang disaat hujan badai.

Lebih jauh disebutkan, Pemko Padang melalui DLH Kota Padang terus berupaya maksimal mengatasi pohon tumbang tersebut.

Ada sebanyak 3 tim petugas DLH Kota Padang bertugas mengatasi pohon pelindung di Padang. Satu tim bisa mengatasi sebanyak 3-4 pohon pelindung di Padang.

Dijelaskannya, tim ini bertugas melakukan pemangkasan pohon yang sudah cukup lebat dahannya untuk mengurangi beban pohon tersebut supaya cukup kokoh bila terjadi hujan badai. Lalu, juga dilakukan pe-

mupukan terhadap pohon yang kondisi akarnya atau batang pohonnya yang sudah rusak sekaligus memberikan perawatan terhadap pohon tersebut.

"Sebanyak 3 tim petugas DLH tersebut bertugas setiap hari melakukan pemupukan, perawatan dan pemangkasan tersebut pada jalan-jalan utama," jelas Fadelan FM.

Ditambahkannya, diminta kepada warga kota untuk tidak melakukan pembakaran sampah di akar pohon pelindung. Bila tertangkap tangan, maka warga kota yang melakukan pembakaran sampah di akar tersebut bisa ditindak sesuai aturan hukum yang ada. (103)

Silaturahmi DPRD Sumbar dan Kajati : Bersama-sama Membangun Sumbar

Padang, Singgalang

Koordinasi antar lembaga menjadi salah satu poin penting untuk membangun daerah. Dengan koordinasi yang baik maka tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai. Untuk itu DPRD Sumbar dan Kejaksaan Tinggi berkomitmen bersama-sama membangun Sumatera Barat.

Itulah salah satu poin tema diskusi saat pertemuan antara unsur pimpinan, anggota DPRD Sumbar dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Yuni Daru Winarsih, Kamis (12/9) di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar.

Kedatangan Kajati ke DPRD Sumbar menjadi silaturahmi awal mula koordinasi yang baik antar dua lembaga.

"Berhubung saya baru menjabat sebagai Kajati di Sumbar tentu silaturahmi ini diperlukan. Saya berharap koordinasi dan kerja sama dengan DPRD akan memberikan manfaat untuk kebaikan Sumbar. Mari bersama-sama membangun Sumatera Barat" ujar Yuni pada wartawan se usai pertemuan tersebut.

Ia mengatakan sebagai pemimpin lembaga kejaksaan, ia dengan tangan terbuka menja-



DISAMBUT- Kajati Sumbar disambut unsur pimpinan dan anggota dewan saat berkunjung ke DPRD Sumbar dalam rangka silaturahmi, Kamis (12/9). (septri)

lin kerja sama dengan DPRD Sumbar menjadi lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Sumbar.

"Baik lembaga vertikal maupun lembaga horizontal tentu harus berkoordinasi dengan baik agar daerah bisa maju," katanya.

Pada pertemuan itu, ada pula dibahas tentang beberapa hal yang perlu ditertibkan di Sumbar agar tidak ada pelanggaran hukum. Salah satunya tentang pungutan liar (pungli) di sekolah.

"Pungli di sekolah tentu tak boleh dibiarkan karena ini tentu memberatkan para orangtua

murid yang memiliki pendapat berbeda-beda," ujarnya.

Masalah pungli di sekolah, kejaksaan, kata dia juga mendapatkan laporan dan masalah ini perlu ditertibkan.

Selain itu ada beberapa permasalahan lain yang juga menjadi catatan kajati. Ia mengatakan beberapa kasus yang sedang berjalan akan dilanjutkan sesuai aturan.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Sementara, Irsyad Safar menyambut baik kedatangan Kajati dan rombongan di DPRD Sumbar.

"Kami sangat mengapresia-

si kunjungan Kajati. Ini adalah wujud baik kejaksaan untuk menjalin koordinasi yang baik dengan DPRD di bawah kepemimpinan Kajati baru," ujar Irsyad.

Ia mengatakan selamat datang pada kajati di ranah Minang dan berkata DPRD siap menjalani koordinasi yang baik dengan kejaksaan.

Selain juga berharap di daerah yang baru bagi kajati ini, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat dilaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti.

"Sekarang ini memang belum ada pimpinan definitif di DPRD Sumbar. Tapi di bawah kepemimpinan ketua dan wakil-wakil ketua definitif nantinya kita berharap koordinasi ini akan bermanfaat untuk bersama-sama memajukan Sumatera Barat," lanjut Irsyad.

Selain Ketua DPRD Sumbar Sementara, Irsyad Safar, pertemuan silaturahmi tersebut juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbar, diantaranya Nanda Satria, Muzli M. Nur, Zulkenedi Said, Muhammad Iqra Chissa Putra dan Verry Mulyadi. Selain itu juga hadir Sekwan Rafliis, Kabag Persidangan Zardi Syahrir. (401)

Satpol PP Razia Kos-kosan

PADANG - Dalam upaya menegakkan peraturan daerah dan memastikan ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang melaksanakan pengawasan rutin terhadap kos-kosan dan hotel yang diduga kerap melakukan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di wilayah Kota Padang, Rabu (11/9) malam.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Satpol PP untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga kota.

Kepala Satpol PP Kota Padang, Chandra Eka Putra melalui Kabid P3D, Rio Ebu Pratama menjelaskan, pada pengawasan malam ini ada tiga penginapan yang dilakukan pengawasan ditemukan satu kos-kosan dan satu hotel yang diduga menyalahi aturan yang berlaku.

"Penertiban ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa semua kegiatan usaha, baik kos-kosan maupun hotel beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami ingin menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh warga, serta mendorong kepatuhan terhadap Perda," ujar Rio Ebu Pratama.

Kos-kosan dan Hotel yang ditemukan pelanggaran yakni kosan yang berada di Kawasan Jalan Niaga dan hotel di Kawasan jalan Bandar Pulau Karam diduga, kosan dan hotel tersebut tidak memiliki dokumen izin usaha yang sah, seperti kos-kosan Kawasan jalan Niaga ditemukan adanya seorang laki-laki berada dalam kamar kosan, padahal jelas disana kosan perempuan.

"Untuk sementara, dua laki-laki dan dua wanita kita bawa ke Mako untuk di mintai keterangannya lebih lanjut, serta pemilik kos-kosan dan hotel juga kita berikan surat panggilan untuk menghadap PPNs," tuturnya.

Satpol PP Kota Padang, mengajak seluruh pemilik kos-kosan, hotel dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan adanya kerjasama dari semua pihak tersebut, diharapkan Kota Padang terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik dan nyaman untuk ditempati. (109)

Dinas Pertanian Terus Genjot Produktivitas Padi



Yoice Yuliani

PADANG - Produksi padi di Padang, delapan bulan terakhir rentang waktu Januari-Agustus 2024 mencapai 31.320 ton. Angka itu menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 38.621 ton.

Kepala Dinas Pertanian Padang Yoice Yuliani mengatakan, pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan produksi padi.

"Kami berusaha meminimalisir permasalahan demi meningkatkan produksi padi. Sejauh ini, produktivitas padi di Kota Padang masih di angka 5,2 ton per hektare," ujarnya.

Dalam meningkatkan indeks pertanaman, Dinas Pertanian Kota Padang telah menyalurkan mesin pompa air sebanyak 9 unit yang tersebar di beberapa lokasi. Adanya bantuan ini membantu petani untuk mengambil air dari sumber-sumber air, seperti sungai untuk dialirkan ke sawah tadah hujan.

"Paling banyak di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, karena di sana banyak sawah tadah hujan. Bantuan pompa air sawah sudah dimanfaatkan oleh petani. Sebelumnya mereka menanam hanya satu setengah kali. Dengan adanya bantuan pompa air, mereka tidak bergantung hujan lagi," terangnya.

Yoice Yuliani melanjutkan, pihaknya masih akan menyalurkan 10 unit mesin pompa air sampai akhir 2024. Syarat kelompok tani penerima adalah yang memiliki sawah berlokasi paling jauh 15-20 meter dari sungai sebagai sumber air pompa.

Sebagai upaya peningkatan produktivitas padi, Dinas Pertanian Kota Padang telah memberi bantuan program MANTAP (Mandiri Benih Tanaman Pangan) dari Kementerian Pertanian RI, berupa benih pokok kepada 3 kelompok penangkar benih. Rinciannya yakni Kelompok Tani Budi Sepakat 5 Ha di Koto Tengah, Kelompok Tani Taruko 5 Ha di Pauh, dan Kelompok Tani Usaha Karya 5 Ha di Bungus Teluk Kabung.

"Benih yang dibantu adalah benih pokok, sehingga benih pokok ini bisa dilakukan labelisasi. Benih berlabel mutunya lebih baik, sehingga nantinya akan meningkatkan produktivitas padi," ucap Yoice Yuliani.

Dalam rangka pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, telah dilakukan Gerakan Pengendalian (Gerdal) OPT tanaman padi pada beberapa kelompok tani yang tanaman padinya mulai ada indikasi adanya hama.

Untuk bantuan prasarana, Dinas Pertanian Kota Padang 2024 ini memberikan bantuan perbaikan Jaringan Irigasi Tersier pada 2 kelompok tani yakni Kelompok Tani Tunas Harapan di Pauh dan Kelompok Tani Tuah Sakato di Kuranji.

Selain bantuan sarana dan prasarana pertanian, Dinas Pertanian Kota Padang rutin melakukan upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan kelompok tani melalui 33 orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di Kota Padang.

"Misalnya, bagaimana petani tidak membakar jerami, karena jerami apabila dikembalikan ke tanah dapat mengembalikan kesuburan lahan sawah. Jika jerami dibakar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca," tuturnya.

Dinas Pertanian Kota Padang juga melakukan demplot Bersawah Pokok Murah di Kecamatan Kuranji. Tujuannya mengurangi biaya produksi sehingga keuntungan yang didapat petani lebih tinggi.

"Bersawah Pokok Murah hemat dari sisi pemakaian pupuk anorganik dan biaya pengolahan lahan. Jerami bisa dijadikan mulsa untuk menghambat pertumbuhan gulma, karena pertanaman padi Bersawah Pokok Murah dilakukan pada bedeng-bedeng," imbuh dia.

Yoice Yuliani mencatat, Kota Padang saat ini memiliki lahan sawah seluas 4.341 Ha berdasarkan data yang dikeluarkan ATR/BPN. Jumlah itu terus berkurang setiap tahun karena alih fungsi lahan menjadi lahan non-pertanian. Adapun Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sampai 2030 mendatangi seluas kurang lebih 2.400 Ha.

"Berbagai upaya kita lakukan untuk peningkatan produktivitas padi sehingga target produksi padi yang ditetapkan dapat tercapai," tandasnya. (406)



RAZIA- Jajaran Satpol PP melakukan pengawasan dan razia ke sejumlah kos-kosan. (humas)